BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ini berbagai kota di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Bila ditahun 1990 penduduk Indonesia yang tinggal diperkotaan berjumlah 30,9 persen, maka pada tahun 2010 proporsi penduduk diperkotaan meningkat menjadi 49,8 persen. Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2019 memperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk diperkotaan akan meningkat lagi menjadi 56,7 persen dan pada tahun 2035 sebanyak 66,6 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dikota tidaklah terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dan dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan kapasitas produksi nasional dan mendorong terjadinya transformasi struktural. Adapun transformasi struktural didefinisikan sebagai perubahan struktur ekonomi dari sektor tradisonal yang memiliki produktivitas rendah menuju sektor ekonomi dengan produktivitas tinggi (Todaro dan Smith, 2006).

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi sebuah kota akibat transformasi struktural haruslah diikuti dengan transformasi ketenagakerjaannya, yang ditandai dengan meningkatnya proporsi kesempatan kerja dari lapangan kerja yang memiliki produktivitas rendah ke lapangan kerja yang berproduktivitas tinggi (Todaro dan Smith 2014). Namun pada kenyataannya transformasi ketenagakerjaan di Indonesia masihlah tertinggal dan salah satu masalah yang menjadi penyebabnya adalah tingginya angka penawaran tenaga kerja. Laporan

BPS (2020) menyebutkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,88 juta orang pada Februari 2020, naik sebanyak 60.000 orang dibanding periode yang sama tahun 2019. Tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia secara umum terjadi akibat dari ketidaksesuaian antara peningkatan jumlah tenaga kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya menyediakan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan riil masyarakatnya. Namun dari penduduk tersebut tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan di sektor formal yang mana dapat memberikan penghasilan tetap secara berkala dan berkesinambungan bagi pekerjanya. Penduduk yang tidak tertampung pada sektor formal pada gilirannya akan menjadi pengangguran ataupun berkerja di sektor informal.

Hampir sebagian besar perkembangan kota-kota besar di dunia ketiga, khususnya di Asia Tenggara sering tidak diimbangi oleh tersedianya kesempatan kerja yang memadai, meskipun secara nyata menunjukkan perkembangan ekonomi yang cukup pesat (McGee, 1977). Luapan angkatan kerja di pedesaan akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi sementara kesempatan kerja yang sangat terbatas telah mendorong proses migrasi besar-besaran dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya kantong-kantong pemukiman kumuh, dengan pekerjaan serabutan di sektor informal dengan produktivitas rendah dan subsisten (Dieter Ever, 1991). Proses informalisasi di Indonesia terjadi karena sifat subsistensi, produktivitas rendah, pemupukan modal dan investasi lemah, serta tekanan kuat dari sistem makro. Masalah Sektor Informal ini menjadi semakin rumit di negara sedang

berkembang termasuk Indonesia karena pranata Informal tidak mendukung keberadaan sektor informal dalam arti yang sebenarnya. Di tingkat Nasional eksistensi kaum miskin sangat dilindungi dalam bentuk UUD 1945 dan GBHN serta perangkat hukum lainnya, tetapi di tingkat daerah dalam operasional pelaksanaan sehari-hari keberadaan sektor infromal terdiskriminasi dan tersisihkan (Rachbini, 1994).

Gelombang ketidakpuasan kaum miskin dan para penganggur terhadap ketidakmampuan pembangunan menyediakan peluang kerja, untuk sementara dapat diredam lantaran tersedia peluang kerja di sektor informal. Begitupun ketika kebijakan pembangunan cenderung menguntungkan usaha skala besar, sektor informal kendati tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, dapat memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan, tatkala perekonomian nasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi.

Tabel 1.1 Kontribusi sektor formal dan sektor informal dalam menyerap angkatan kerja Indonesia, Tahun 2016 – 2020

Tahun	Sektor	
	Formal (Juta Jiwa)	**Informal (Juta Jiwa)**
2016	50,20	68.20
2017	52.00	69.02
2018	53.52	70.41
2019	56.02	70,49
2020	56.49	70,02

Sumber: BPS Indonesia 2020

Dari tabel 1.1 memperlihatkan kondisi bahwa sektor informal masih memegang peranan penting dalam menampung angkatan kerja,di Indonesia terutama angkatan kerja muda yang masih belum berpengalaman atau angkatan kerja yang pertama kali masuk pasar kerja. Keadaan ini dapat mempunyai dampak positif mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Pertumbuhan pesat sektor informal ini diperkirakan masih akan berlanjut. Salah satu argumen logisnya, prospek penciptaan lapangan kerja yang masih suram di sektor formal dan angka pengangguran terus meningkat beberapa tahun terakhir, Sektor informal dinilai sangat penting bagi negara berpenduduk besar seperti Indonesia dimana sektor informal yang bersifat padat karya mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan yang diciptakan pemerintah kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, bekerja disektor informal dengan segala kelebihan dan kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif peluang kerja bagi para pencari kerja. Contohnya pada saat krisis melanda Indonesia pada tahun 1997, sektor informal terbukti mampu menjadi peredam *(buffer)* gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung jutaan buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Keberadaan sektor informal membuat angka pengangguran dan kemiskinan tidak membengkak seperti yang dicemaskan. Pasca kritis, sektor informal kembali menjadi katup pengaman ditengah ketidakmampuan pemerintah dan sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja.

Kota Jambi sebagai ibukota provinsi Jambi merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan pelayanan jasa utama di Provinsi Jambi. Sebagai pusat kegiatan ekonomi, penduduk kota Jambi juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi yaitu rata rata 2,98 persen. Bila pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Jambi berjumlah 576.067 jiwa, maka pada tahun 2019 meningkat menjadi 616.335 jiwa (BPS, 2019). Perkembangan penduduk kota Jambi yang cukup besar merupakan potensi pasar dan diproyeksikan akan tumbuh sebagai kota bisnis. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan perekonomian kota Jambi yang berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik dalam beberapa tahun ini cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan. Bila dilihat dari peranannya dalam perekonomian provinsi Jambi, maka kota Jambi memiliki peran yang cukup strategis. Kontribusi PDRB kota Jambi terhadap PDRB provinsi Jambi pada periode yang sama menunjukkan angka 16,4 persen, atau tertinggi diantara 11 kabupaten kota yang ada di provinsi Jambi (BPS Jambi, 2018).

Dengan perkembangan penduduk kota Jambi yang pesat, maka permasalahan ketenagakerjaan di kota Jambi adalah bagaimana menciptakan kesempatan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran sehingga pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja tidak lagi menjadi beban pembangunan, tetapi sebaliknya menjadi modal pembangunan. Sebagai ibukota provinsi, Kota Jambi mempunyai jumlah angkatan kerja yang paling besar diantara 11 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Banyaknya angkatan kerja Kota Jambi mencapai 297.290 orang pada tahun 2018 atau 16,6 persen dari keseluruhan angkatan kerja yang ada di Provinsi Jambi (BPS Jambi, 2018). Hal ini disebabkan sebagai pusat

kegiatan ekonomi regional Kota Jambi dengan potensi ekonomi yang dimiliki telah menjadi harapan bagi masyarakat Kota Jambi dan wilayah lain untuk dapat menyediakan lapangan kerja. Dengan jumlah angkatan kerja yang besar, maka tingkat pengangguran terbuka juga tinggi, yaitu sebesar 7,4 persen (BPS Jambi, 2019). Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Jambi untuk menggali potensi ekonomi kota, sehingga dapat membuka kesempatan kerja lebih luas lagi. Secara ekonomis dengan adanya peningkatan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya sekedar kebutuhan akan sandang dan pangan, tetapi juga kebutuhan akan sumber pendapatan.

Besarnya jumlah angkatan kerja yang bekerja di Kota Jambi dapat menjadi gambaran kesempatan kerja yang telah terbuka oleh setiap sektor-sektor ekonomi atau lapangan usaha yang ada. Dari hasil penelitian, terungkap bahwa kesempatan kerja menurut lapangan usaha yang dominan menyerap tenaga kerja adalah perdagangan, termasuk dalam sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar, hotel dan restoran (BPS Jambi, 2018). Sementara sektor kedua terbesar yang menyerap angkatan kerja adalah sektor Jasa-Jasa. Sektor ini terdiri dari sub sektor Jasa Pemerintah dan Jasa Swasta (BPS Jambi, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Mahilli (2008), bahwa perekonomian kota merupakan ujung tombak terjadinya transformasi struktur kesempatan kerja, yaitu dari angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian beralih ke industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran, serta jasa-jasa lainnya. Dari sisi status pekerjaan, angkatan kerja di kota Jambi lebih banyak yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap adan sebagai buruh/pegawai/karyawan, atau mereka yang bekerja di sektor formal

(BPS Jambi, 2019). Angkatan kerja yang bekerja di sektor formal kota Jambi dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2018 rata-rata berjumlah 64,8 persen dari keseluruhan pekerja. Sedangkan sisanya sebanyak 35,2 persen bekerja dengan status pekerjaan Informal yaitu kegiatan yang termasuk dalam berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga.

Tabel 1.2 Kontribusi sektor formal dan sektor informal dalam menyerap angkatan kerja Kota Jambi, Tahun 2000 – 2018

Tahun	Sektor		Angkata Kerja (Orang)
	Formal(%)	Informal(%)	
2010	63.5	36.5	218401
2012	69.9	30.1	226607
2014	57.5	42.5	235722
2016	66.1	33,9	261308
2018	67.0	33.0	275387
Perkembangan Rata-Rata (%)	3.2	1.5	2.6

Sumber: BPS Kota Jambi 2019

Tingginya pekerja dengan status pekerjaan utama sebagai pekerja sektor formal, hal ini disebabkan Kota Jambi merupakan kota yang tumbuh sebagai pusat perekonomian di Provinsi Jambi dan pusat pelayanan jasa pemerintahan. Dengan status pusat kegiatan ekonomi Provinsi Jambi, investasi di Kota Jambi sangatlah beragam, baik perusahaan Perdagangan, Keuangan, dan Jasa. Keadaan ini mendorong berkembangnya pusat perbelanjaan dan bisnis ritel di Kota Jambi, baik skala besar ataupun sedang yang menyerap banyak pekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sebagai ibukota provinsi, Kota Jambi juga menjadi pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan, keadaan ini juga menyebabkan pekerja formal memberikan peluang yang paling besar dalam struktur kesempatan kerja di kota Jambi.

Meskipun jumlah partisipasi para pekerja sektor informal tidak sebesar sektor formal namun sektor informal cukup berperan dalam upaya penciptaan

lapangan kerja yang belum mencukupi dan mengatasi masalah pengangguran. Dampak positif dari keberadaan sektor informal di Kota Jambi adalah terbukanya peluang usaha dan bekerja bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam kegiatan ekonomi formal, dampak lainnya adalah aktivitas ekonomi menjadi meningkat karena sektor informal juga menjadi penjual sekaligus mengkonsumsi hasil-hasil produksi sektor formal. Pada dasarnya sektor informal ini terjadi dikarenakan kondisi jumlah tenaga kerja yang terus bertambah sementara jumlah lapangan kerja dan permintaan tenaga kerja tidak mencukupi, akibatnya semakin meningkat jumlah tenaga kerja maka menyebabkan keadaan upah yang semakin menurun dan menuju keseimbangan pasar tenaga kerja yang baru. Untuk mengatasi masalah ini maka para pekerja memutuskan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri

Disamping dampak positif tentu juga ada dampak negatifnya, yaitu umumnya sektor informal tidak bekerja dalam sistem ekonomi yang terorganisir sehingga keberadaannya tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, sektor informal dapat melahirkan kriminalitas karena mereka umumnya beroperasi di wilayah-wilayah terlarang dan membutuhkan perlindungan keamanan, di sisi lain sektor informal cenderung merusak keindahan kota karena tidak tertata rapi. Sektor informal yang berkembang di daerah perkotaan juga memberikan dampak terhadap meningkatnya migran masuk ke daerah perkotaan dan menjadi penyebab sulitnya penataan daerah perkotaan. Hal ini akan memberikan dampak terhadap semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana sosial serta keamanan mereka. Belum ada data yang pasti mengenai jumlah mereka yang bekerja di sektor informal,

khususnya di daerah Jambi. Hal ini karena sulitnya dilakukan pendataan, terutama mengingat sektor informal sering berpindah tempat dan kadangkala musiman, seperti penjual buah-buahan, makanan, buruh bangunan dan sebagainya.

Sektor informal perkotaan adalah mereka para pekerja di sektor informal yang berada di wilayah perkotaan, Kegiatan informal terbagi menjadi dua, pertama, sektor informal yang aktivitas ekonominya memberikan layanan penting kepada masyarakat kota, berfungsi sebagai pelengkap sektor formal seperti pengusaha transportasi, pedagang makanan, warung dan jasa kecil-kecilan. Kedua, tipologi sektor informal dengan kegiatan marginal, dan cenderung bersifat personal. Aktivitas ekonomi dari tipologi ini biasanya tanpa modal dan lebih menekankan pada kekuatan fisik seperti pembantu rumah tangga, pengamen, dan pemulung, buruh, dan yang lainya. Sektor informal lebih dipandang sebagai aktivitas ekonomi tambahan (tersier), berskala kecil, menggunakan modal yang kecil dan pendapatan yang sedikit, kurang prodiktif dan mempunyai ospek yang tidak menjanjikan yang diikuti oleh pekerja yang mempunyai pendidikan dan pengalaman kerja yang rendah.

Setelah dilakukannya survei dengan menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada responden yaitu para pekerja informal di Kota Jambi antara lain dibidang angkutan, perdagangan, industri pengolahan, buruh bangunan, dan jasa menunjukkan permasalahan sektor informal antara lain keikutsertaan pekerja laki-laki maupun perempuan, dari sisi pendapatan, modal, jumlah tanggungan pekerja serta pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Pekerja Informal Kota Jambi didominasi oleh pekerja laki-laki dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 69 persen. Jumlah pendapatan pekerja Informal kota Jambi berkisar antara

Rp.500.000,00–700.000,00 perminggunya, yang mana jumlah ini tidaklah memenuhi standar upah minimum Kota Jambi yang sebesar Rp.2.900.000,00 perbulannya dan dengan penggunanaan modal Rp.500.000-1.000.000 perminggu. Sektor informal Kota Jambi juga didominasi oleh pekerja dengan pendidikan tamatan SMA, hal ini berarti pekerjaan disektor informal tidak lagi hanya dilakukan oleh pekerja dengan pendidikan yang rendah saja seperti tamatan SD maupun SMP dan berbeda dengan teori yang ada yang menyatakan bahwa sebagian besar pekerjaan di sektor informal didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah, dengan pengalaman kerja antara 9 sampai dengan 18 tahun dengan jumlah tanggungan setiap pekerja 3 sampai 5 orang, pekerja tidak hanya bekerja untuk membiayai hidupnya sendiri melainkan juga keluarga maupun saudaranya yang lain. Berdasarkan survei dilapangan didapatkan beberapa alasan yang membuat pekerja memilih bekerja di sektor Informal. Pertama, perkembangan ekonomi digital dan teknologi memacu tumbuhnya wiraswasta secara online dan mandiri. Selain itu, pertumbuhan sektor informal juga dipengaruhi dari karakteristik kaum milennial yang cenderung memilih jam kerja fleksibel. Sisi lainnya, pertumbuhan pekerja informal juga dapat disebabkan alternatif terakhir untuk sekadar mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pembangunan yang tidak merata juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor informal.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa motif ekonomi dan kependudukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi seseorang untuk bekerja dengan jam kerja panjang maupun pendek. Meskipun demikian tidak berarti faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi dan kependudukan tidak mempunyai pengaruh pada keputusan seseorang untuk bekerja. Faktor-

faktor sosial budaya, psikologi dan lingkungan sering mempunyai pengaruh yang cukup untuk menentukan terhadap keputusan seseorang untuk bekerja dengan jam kerja sesuai dengan pilihan mereka. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dipandang dominan mempengaruhi seseorang bersedia menyediakan waktunya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Faktor ekonomi tersebut antara lain tercermin pada tingkat upah dan modal yang dimiliki. Namun demikian faktor kependudukan seperti halnya umur, jenis kelamin, tempat tinggal dan status perkawinan serta tingkat pendidikan dan faktor pengalaman bekerja tak dapat diabaikan begitu saja dalam analisis jam kerja para pekerja. Jam kerja merupakan indikator penting untuk menganalisis dinamika pasar tenaga kerja, di mana indikator ini berpengaruh untuk mengukur antara *underemployment* dan produktivitas tenaga kerja.

Dalam penelitian Puguh et all.(2000) ditemukan bahwa jam kerja standar di Indonesia adalah 40 jam per minggu yang merupakan jam kerja panjang per hari. Jam kerja standar ini umumnya diterapkan pada usaha kecil, sedangkan usaha besar menerapkan 8 jam per hari atau ekuivalen dengan 48 jam per minggu. Pekerja dengan jam kerja yang tinggi ini merupakan indikator yang penting dalam pasar tenaga kerja di Indonesia. Persentase laki-laki yang bekerja dengan jam kerja panjang lebih besar daripada perempuan yaitu sekitar 54 persen sedangkan persentase perempuan hanya 34 persen. Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan jumlah orang yang bekerja dengan jam kerja pendek atau kurang dari 10 jam per minggu, di mana lebih banyak perempuan yang mempunyai jam kerja pendek dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah jam kerja berhubungan dengan besarnya pendapatan. Terdapat pilihan bagi individu untuk mengalokasikan

waktunya hingga seseorang mencapai kepuasan maksimal, yakni individu dapat menyeimbangkan penghargaan dalam bentuk uang dari bekerja terhadap manfaat fisik dari aktivitas lainnya yang tidak dibayar (Nicholson, 2002). Oleh karena itu, setiap individu memiliki respon ataupun preferensi yang berbeda-beda mengenai upah yang telah diperolehnya dan pengalokasian waktu yang dilakukan. Seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka dewan pengupahan kota jambi menetapkan upah minimum kota (UMK) pada tahun 2020 sebesar Rp.2,9 juta dan meningkat sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya.

Payaman (1996) mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi curahan jam kerja seseorang selain upah *(non wage*) yaitu variabel kependudukan, meliputi : jenis kelamin, umur, dan jumlah tanggungan keluarga. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja cenderung berbeda untuk setiap kelompok umur, dengan dipengaruhi status kawin dan perbedaan tingkat pendidikan. Dibandingkan dengan laki-laki aktivitas perempuan cenderung lebih rendah karena pandangan konvensional bahwa perempuan harus mengatur rumah tangga. Jika jumlah anak atau keluarga yang menjadi tanggungan semakin besar maka tuntutan untuk memperoleh upah agar dapat memenuhi kebutuhannya juga semakin besar sehingga jam kerja menjadi lebih panjang. Berdasarkan jenis kelamin, dalam penelitian Yunastiti dan Murtiningsih (2006) dan juga dalam penelitian Panca Mandala Putra (2008) ditemukan terdapat perbedaan respon dalam curahan jam kerja antara laki-laki dan perempuan. Terutama perempuan, karena adanya pandangan konvensional bahwa perempuan harus mengatur rumah tangga dimana jam kerja para pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan jam kerja perempuan pada setiap tingkat upah. Penelitian yang dilakukan oleh Novita

Eliana dan Rita Ratina (2007) pada variabel jumlah tanggungan keluarga tidak mempengaruhi curahan waktumtenaga kerja wanita dalam bekerja mencari nafkah. Berbeda dengan hasilmpenelitian yang dilakukan Panca Mandala Putra (2008), variabel jumlah anggota keluarga memiliki pengaruh yang positif terhadap curahan jam kerja. Selain untuk kebutuhan biologisnya, seseorang akan mencurahkan waktunya untuk bekerja atau menikmati waktu luang (*leisure*) (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Diperkirakan variabel yang mempengaruhi curahan jam kerja, yaitu upah dan non upah seperti variabel kependudukan meliputi : jenis kelamin, dan jumlah tanggungan keluarga.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja di sektor informal adalah jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, modal, jumlah tanggungan, dan lama bekerja pekerja itu sendiri. Namun dikarenakan adanya *gap* atau ketidaksesuaian antara teori atau empiris dengan kenyataan kondisi pekerja, maka hal itulah yang menjadi dasar ketertarikan diadakannya penelitan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja sektor informal di Kota Jambi. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Sektor Informal di Kota Jambi".

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran, maka salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan adanya sektor informal. Sebelumnya perlu diperhatikan bagaimana kondisi pekerja sektor informal baik dari segi ekonomi maupun kependudukannya, karena dari faktor-faktor tersebutlah yang akan mempengaruhi

bagaimana penawaran tenaga kerja pekerja di sektor informal, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana kondisi tenaga kerja sektor informal di Kota Jambi, dilihat dari jenis kelamin, pendidikan, jumlah pendapatan, modal, jumlah tanggungan dan lama bekerjanya.
2) Apakah faktor jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, modal, jumlah tanggungan dan lama bekerja pada pekerjaan informal mempunyai pengaruh terhadap penawaran tenaga kerja di sektor informal.

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah kita dapat melihat yang disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis kondisi tenaga kerja sektor Informal di Kota Jambi.
2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap terhadap penawaran tenaga kerja di sektor informal di Kota Jambi.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA